



පරිපාලන ප්‍රාදේශීය සභාව

PEMERINTAH PROVINSI BALI

සමස්ත ප්‍රදේශයේ පාලන සංවිධානය

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,

සමස්ත ප්‍රදේශයේ පාලන සංවිධානය

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

රාජ්‍ය සංවර්ධන සහ ප්‍රජා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව (පදනම) / ප්‍රජා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව (පදනම)

Jalan D.I. Pandjaitan Nomor 5 Denpasar – Bali (802350), Telepon (0361) 249805

Laman : <https://dpmddukcapil.baliprov.go.id>, Pos-el : dpmddukcapil@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) 2025

Perangkat Daerah	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.
Bidang/Bagian	: Penataan Penduduk dan Keluarga Berencana
Tim Kerja	: Pendataan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Program	: Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Capaian Program (Outcome)	: Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana
Target Outcome Program	: 4 Sektor
Nama Kegiatan	: Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal
Indikator Hasil Kegiatan	: Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi program KB <i>Krama Bali</i>
Target Hasil Kegiatan	: 1351 orang
Nama Sub Kegiatan	: Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai Kearifan Budaya Lokal
Keluaran Sub Kegiatan (Output)	: Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai Kearifan Budaya Lokal
Target (Output) Sub Kegiatan	: 1 (satu) Dokumen

I. Latar Belakang

1.1 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, KB dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
- d. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
- e. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali di Bidang Penataan Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Peraturan Gubernur Bali;
- f. Instruksi Gubernur Bali Nomor 1545 Tahun 2019 tentang Sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) *Krama Bali*;
- g. DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Nomor DPA: DPA/A.1/2.13.2.12.2.14.01.0000/001/2025, Tanggal 2 Januari 2025.

1.2 Gambaran Umum

Ketersediaan dan Kualitas data dan informasi Keluarga Berencana yang memadai, akurat dan tepat waktu merupakan landasan penting dalam pelaksanaan Program KB *Krama* Bali, selain itu penyediaan data dan informasi Keluarga Berencana untuk digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan dan pembangunan.

Pengumpulan Data KB melibatkan mitra kerja seperti perwakilan BKKBN Provinsi Bali serta OPD Kabupaten/Kota se-Bali yang menangani urusan KB. Penyajian data dan informasi disajikan melalui sistem informasi berbasis IT sebagai pusat data informasi.

Persoalan perkembangan kependudukan dari aspek kuantitas maupun kualitas telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konsep dasar pembangunan Provinsi Bali. Perkembangan kependudukan menjadi faktor penentu arah kebijakan pembangunan yang dicanangkan di berbagai sektor. Terkait dengan kependudukan Provinsi Bali saat ini didorong untuk melaksanakan sosialisasi guna mempertahankan budaya kearifan lokal melalui KB *Krama* Bali. Provinsi Bali memiliki potret perkembangan penduduk yang sangat dinamis, terutama jika dikaitkan dengan pesatnya perkembangan industri pariwisata dan budaya masyarakat yang khas yang menopang perekonomian masyarakat Bali.

Konteks ini sekaligus merupakan dasar pijakan pentingnya ketersediaan sebuah dokumen yang memuat gambaran yang komprehensif dan terkini tentang kondisi perkembangan kependudukan yang terjadi dari waktu ke waktu. Data dan informasi kependudukan yang diperlukan dalam penyusunan program KB *Krama* Bali bersumber dari registrasi penduduk yang merupakan data hasil pelayanan pendataan penduduk dan pencatatan sipil seperti salah satu substansi dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Elemen data hasil registrasi kependudukan yang dipergunakan dalam menyusun profil KB *Krama* Bali meliputi data yang berhubungan dengan kualitas penduduk, kuantitas penduduk, dan mobilitas penduduk.

II. Penerima Manfaat

Adapun penerima manfaat dari Sub Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai kearifan Budaya Lokal adalah:

- 2.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali
- 2.2 Perwakilan BKKBN Provinsi Bali sebagai mitra kerja dalam sinkronisasi data dan informasi Keluarga Berencana;
- 2.3 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali Khususnya OPD yang menangani urusan KB sebagai mitra kerja dalam pengumpulan data dan informasi Keluarga Berencana;
- 2.4 Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang akan memanfaatkan profil Keluarga Berencana sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan mewujudkan keluarga berkualitas.
- 2.5 Masyarakat dan Krama Bali

III. Strategi Pencapaian

3.1 Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini menggunakan metode koordinasi dengan *stakeholder* serta mitra kerja tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali.

3.2 Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keluarga Berencana pada tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data dan informasi KB;
- b. Sosialisasi KB Krama Bali
- c. Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan penataan kependudukan.
- d. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember 2025.

IV. Waktu pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian sasaran yang dibutuhkan sampai dengan selesainya kegiatan ini adalah pada tahun berjalan.

V. Biaya yang diperlukan

Untuk mendukung Sub Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai Kearifan Budaya Lokal Tahun Anggaran 2025 tersebut dibutuhkan dana/anggaran sebesar Rp. **478.838.860,00** (empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

Bali, 2 Januari 2025

PPTK Pada Kegiatan Pengembangan
Desain Program, Pengelolaan Dan
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,
Informasi Dan Edukasi (KIE)
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana (KB) Sesuai Kearifan
Budaya Lokal



I Ketut Merta, S.KM., M.Kes.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690316 199003 1 007

Rencana Anggaran Biaya
Sub Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi,
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (Kie) Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai Kearifan Budaya Lokal
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp. 12.798.000,00
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp. 3.750.600,00
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp. 1.030.500,00
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 1.413.000,00
6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 520.300,00
7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 35.100.000,00
8.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp. 7.400.000,00
9.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 185.793.660,00
10.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	Rp. 52.200.000,00
11.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp. 7.915.500,00
12.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp. 431.520,00
13.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp. 539.400,00
14.	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp. 6.652.380,00
15.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 163.294.000,00
Jumlah Pagu Anggaran Keseluruhan		Rp. 478.838.860,00

RENCANA OPERASIONAL KERJA SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENYEDIAAN MATERI DAN SARANA PROMOSI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL

BIDANG PENATAAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SUMBER & JUMLAH ANGGARAN	SASARAN/VOLUME SUB KEGIATAN	PIHAK/SKPD TERKAIT	JADWAL TAHUN 2025											
					JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 12.798.000	1 Paket													
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kerta dan Cover	Rp 3.750.600	1 Paket													
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 1.030.500	1 Paket													
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp 1.413.000	90 lembar													
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp 520.300	1 Paket													
6	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 35.100.000	1 Paket													
7	Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Rp 7.400.000	1 Paket													
8	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp 185.793.660	6 orang													
9	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Rp 52.200.000	1 Paket													
10	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp 7.915.500	6 orang													
11	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp 431.520	6 orang													
12	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp 539.400	6 orang													
13	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp 6.652.380	6 orang													
14	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 163.294.000	272 orang/ hari													
	TOTAL ANGGARAN	Rp 478.838.860														

Bali, 2 Januari 2025
Kepala Bidang Penataan Penduduk dan Keluarga Berencana,

I Ketut Merta, S.KM., M.Kes
NIP. 19690316 199003 1 007

SOP PELAKSANAAN SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENYEDIAAN MATERI DAN SARANA PROMOSI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL

No.	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Kepala Bidang	Ketua Tim	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kepala Bidang untuk menyusun rencana dan program kerja Sub Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai Kearifan Lokal					Disposisi	15 menit	Disposisi	
2	Menugaskan Ketua Tim untuk menyusun draf rencana dan program kerja Sub Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai Kearifan Lokal					Disposisi	15 menit	Disposisi	
3	Mengonsep dan menugaskan staf untuk menyusun konsep rencana dan program kerja Sub Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai Kearifan Lokal					Disposisi dan Konsep	3 jam	Disposisi dan Konsep	
4	Mengetik dan menyampaikan draf rencana kerja dan program kerja Sub Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai Kearifan Lokal					Draf rencana dan program kerja kegiatan	1 jam	Draf	
5	Memeriksa konsep rencana dan program kerja Sub Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai Kearifan Lokal					Draf rencana dan program kerja kegiatan	1 jam	Draf dan disposisi	
6	Memeriksa draf rencana dan program kerja Sub Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai Kearifan Lokal. Jika setuju menyampaikan kepada Kepala Dinas. Jika tidak setuju menyerahkan kepada Sub Koordinator untuk diperbaiki					Draf rencana dan program kerja kegiatan	1 jam	Draf dan disposisi	
7	Memeriksa draf rencana dan program kerja Sub Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai Kearifan Lokal. Jika setuju menandatangani konsep rencana dan program kerja Sub Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai Kearifan Lokal		 			Draf rencana dan program kerja kegiatan	1 jam	Dokumen rencana dan program	
8	Menyerahkan rencana dan program kerja Sub Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai Kearifan Lokal kepada Kabid untuk di sampaikan ke Sub Koordinator					Draf rencana dan program kerja kegiatan	15 menit	Dispoisi	